



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
KECAMATAN BONTOMATENE
Jl. PAHLAWAN NO. 116
B A T A N G M A T A**

**KEPUTUSAN CAMAT BONTOMATENE
NOMOR 01 / I / TAHUN 2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK) KECAMATAN BONTOMATENE TAHUN ANGGARAN 2026**

CAMAT BONTOMATENE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan pada Kantor Camat Bontomatene Tahun Anggaran 2026, maka dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Nama-Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2013 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2014 Nomor 41);

10. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi, Camat, Sekretaris Camat, Sub Bagian Dan Seksi Pada Kantor Camat Bontomatene Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 52);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 Nomor 50);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 Nomor 122).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kecamatan Bontomatene Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan anggaran.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Datangmata
~~Pada tanggal 2 Januari 2026~~
CAMAT BONTOMATENE,

RUSMIN, S.Sos.,M.M.
NIP. 19790804 200502 1 002

Tembusan ddh kepada:

1. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.
2. Kabag Pembangunan Setda di Benteng.
3. Kabag Hukum Setda di Benteng.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT BONTOMATENE
 NOMOR : 01 / 1 / TAHUN 2026
 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
 DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) KECAMATAN BONTOMATENE
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	RUSMIN, S.Sos, M.M 197908042005021002	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)			
2.	NURSAM, A.Md 197711012010011014	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 8 Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	1.992.000 1.992.000 1.200.000 1.992.000 1.200.000 1.992.000 2.911.800.000 1.512.000	
3.	NUR DAWATI, S.H 198201312010012013	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4 Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 8 Penyediaan Jasa komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik 9 Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor 10 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. 11 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	900.000 16.970.000 780.000 44.936.000 21.118.240 154.493.760 36.130.000 2.000.000	

4.	MAULANA, S.Pt 196902022014072001	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	1. Peningkatan Efektifitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	900.000
5	MURNI OPU, S.ST 198109232006042011	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	15.765.000
6.	SUBHAN NUR, S.M 197904182009031002	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	1. Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tuggal lka serta Pemerintahan dan Pemeliharaan keutuhan 2. Koordinasi / Sinergi degan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Repebliek Indonesia	7.290.000 900.000
7.	MUDA AGUS,S.Pd 197008051992031012	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	1. Pembinaan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragam, Ras dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional.	4.430.000
8.	ALIMUDDIN, S.E 197603092005021003	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	1. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	6.240.000
TOTAL				3.236.533.000

TIGA MELLIAH DUA RATUS DUA PULUH DUA JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU RUPIAH

